

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. PAHLAWAN NO. 14 PAYAKUMBUH, TELP. 0752-92049 FAX.0752-91094

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jln.Pahlawan No.14 Ibh Telp (0752) 92049 Fax (0752) 91094 Payakumbuh

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : /524/SKT/Disnak&KH-2019

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, maka materi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah perlu dijabarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam suatu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisikan :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, yang memuat informasi tentang pelaksanaan Renja Disnak & Keswan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, analisis kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, kemudian dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran Renja, dan program serta kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020.
- IV. Penutup, yang berisi beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2020.

- KETIGA** : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut pada tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : Juli 2020

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAHEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. PRIYADI BUDIMAN
NIP. 19621126 198903 1 003

DAFTAR ISI

BA	: PENDAHULUAN	1
B I		
	1. Latar Belakang	1
	1	
	1. Landasan Hukum	2
	2	
	1. Maksud dan Tujuan	4
	3	
	1. Sistematika Penulisan	5
	4	
BA	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
B II		
	2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnak& Keswan Tahun Lalu dan	9
	1 Capaian Renstra Disnak&Keswan.....	
	2. Analisis Kinerja Pelayanan Disnak&Keswan	1
	2	7
	2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
	3 Disnak&Keswan.....	2
	1
	2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2
	4	3
	2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	3
	5	0
BA	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	3
B III		5

3.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat	3
1	dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	5
3.	Tujuan dan Sasaran Renja Disnak&Keswan	4
2		0
3.	Program dan Kegiatan	4
3		7
BA	: PENUTUP	5
B		2
IV		

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2017 dan capaian Renstra	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disnak & Keswan	21
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disnak & Keswan.....	25
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	52
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DISNAK KESWAN	56
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	56
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	67
	3.3 Program dan Kegiatan	69
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	78
BAB VI	: PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

1.	Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota	12
2.	Tabel T-C30 Pencapaian Kinerja Pelayanan dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	23
3.	Tabel C 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	28
4.	Tabel C4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018	53
5.	Tabel C6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota	81

KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang struktur perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2020 tetap menggunakan struktur perencanaan dan penaggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 tahun 2018. Diman perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2020.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan bermanfaat dan direndhai oleh Allah SWT.

Payakumbuh, Juli 2019

**KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Ir. PRIYADI BUDIMAN
NIP. 19621126 198903 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat

ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ditujukan untuk :

1. Memberi arah dan mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memiliki semangat dan kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasan dan evaluasi.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan

dokumen RKPD, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa

saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 (Tahun lalu) dan Capaian Renstra

Memperhatikan tabel C1 yakni tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra s.d tahun 2019 (tahun berjalan), maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. mempedomani target renja tahun 2019 dan hasil/keluarannya maka ada kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan. Secara umum dapat dilihat bahwa realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Perkiraan capaian kinerja s.d tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s.d tahun 2019 (tahun berjalan)).

TABEL T- C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nomor Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (OutPut)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan 2019 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja OPD Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Urusan Ketahanan Pangan</i>									
1	21	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran						

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	21	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Out Put : Tersedianya jasa surat menyurat berupa : Materai 3000 dan 6000, Amplop, Lembar Disposisi dan Jasa Pengiriman Outcome : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Out Put : Tersedianya penerangan, air bersih dan lancarnya komunikasi dinas Out Come : Lancarnya komunikasi, air bersih, dan penggunaan listrik kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya honorarium aparaturnya kegiatan dinas Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan kebersihan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kelengkapan adm dinas Out Come : Meningkat dan lancarnya	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00

					elayanan administrasi perkantoran								
1	21	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kelengkapan adm dinas Out Come : Meningkat dan lancanya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
03	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Out Come : Meningkat dan lancanya pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatnya pengetahuan ASN	48 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan		
1	21	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu dinas Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	01	18	Rapat-rapat Kordinasi dn Konsultasi Ke Luar Daerah	Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Out Come : Meningkat dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
1	21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur								
1	21	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Output : Tersedianya mobil untuk kepala dinas yang menunjang operaional tugas sehari-hari Out Come : Meningkatnya sarana dan prasarana	2 Unit	1 unit-				1 unit-	1 unit	50,00 -
1	21	02	12	Pengadaan alat alat angkutan darat bermotor	Output : Tersedianya kendaraan roda dua untuk aparatur Out Come : Meningkat dan lancarnya	12 Unit	-		-	-	-		-

					elayanan administrasi perkantoran										
1				2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	21	16		Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kualitas kelompok tani ternak baik adm maupun pengembangan usaha kelompok										
1	21	16	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Output : Terlaksananya peningkatan pemberdayaan anggota kelompok tani ternak Out Come : Meningktanya kualitas kelompok tani ternak baik adm maupun pengembangan usaha kelompok	250 kelompok	100 kelompok	50 kelompok	50 kelompok	100,00	50 kelompok	200 kelompok	80,00		
				Urusan Pertanian											
2	01	21		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak										
2	01	21	01	Pendataan Masalah Peternakan	Output : Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini Terlaksananya pendataan dan pembinaan toko obat hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan yang profesional Out Come : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	25 PHMS	10 PHMS	5 PHMS	5 PHMS	100,00	5 PHMS	20 PHMS	80,00		
2	01	21	02	Pemeliharaan kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Output : Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular Out Come : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	61000 dosis	2650 dosis	6500 dosis	1.050 dosis	1,00	2.250 dosis	5.950 dosis	9,75		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01	21	03	Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	Output : Terlaksananya Pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit hewan menular rabies dan AI Out Come : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	25000 ekor	5300 ekor	50 ekor	50 ekor	100,00	50 ekor	5400 ekor	21,6
2	01	21	04	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	- Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	65 Kec	26 Kec	13 Kec	13 Kec	100,00	13 Kec	52 Kec	86,66
					- Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)	30 TPH	12 TPH	6 TPH	6 TPH	100,00	6 TPH	24 TPH	80,00
					- Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan	25 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	100,00	10 sampel	30 Sampel	120,00
					- Terlaksananya pengawasan pangan asal hewan	25 Pasar	10 Pasar	5 pasar	5 pasar	100,00	5 pasar	20 Pasar	80,00

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									
2	01	22	01	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak	- Tersedianya sarana dan prasarana peralatan IB dan reproduksi ET pada seluruh pos IB di Kab. Lima Puluh Kota	65000 dosis	12000 dosis	10.000 dosis	10.000	-100,00	12500 dosis	34500 dosis	53,08
2	01	22	02	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	- Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di IB	15000 ekor	4000 ekor	6000 ekor	1000 ekor	16,66	3000 ekor	12.920 ekor	86,13
					- Terlaksananya pembinaan , monitoring dan evaluasi IB dan ET	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
					- Terlaksananya PKB dan kegiatan lainnya pada bidang produksi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00
2	01	22	03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	- Terlaksananya pengadaan ternak dan pendistribusiannya untuk kelompok tani di Kabupaten Lima Puluh Kota	145 ekor	53 ekor	16 ekor	34 ekor	212,5	30 ekor	117 ekor	80,68
					- Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit ternak kepada masyarakat dan kegiatan lainnya di bidang produksi	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	48 bulan	80,00
2	01	22	05	Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak	- Terlaksananya kegiatan pengolahan pakan alternatif pada kelompok tani	74 kelompok	20 kelompok	10 kelompok	8 kelompok	80,00	15 kelompok	43 kelompok	58,10
					- Terlaksananya kegiatan percobaan pakan konsentrat sapi potong pada kelompok tani	115 ekor	25 ekor	10 ekor	10 ekor	100,00	25 ekor	60 ekor	52,17

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					- Tersedianya bahan penyuluhan (buku) tentang gizi dan pakan ternak	250 buku	50 buku	100 buku	10 buku	20,00	50 buku	210 buku	84,00
2	01	22	06	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	- Tersedianya vaksin anti rabies untuk petugas kesehatan hewan	10000 dosis	4000 dosis	1500 dosis	1200 dosis	80,00	2000 dosis	5200 ekor	52,00
2	01	22	08	Pengembangan agribisnis peternakan	- Teregisternya kandang ternak unggas dan ternak besar	750 plang	250 plang	225 plang	225 plang	100,00	250 plang	725 plang	96,67
2	01	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan									
2	01	23	05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan	- Terpelihara dan terawat nya pasar ternak	10 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00	2 lokasi	8 lokasi	80,00
2	01	23	07	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	- Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	3 kali	80,00
2	01	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan									
2	01	24	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terlaksananya pengadaan alsinnak	32 paket	17 paket	7 paket	6 paket	85,71	7 paket	23 paket	71,87
2	01	24		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan lapangan									
2	01	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH)	80 Orang	19 orang-	19 orang -	19 orang -	100,00 -	19 orang	38 orang	47,5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan tolok ukur dan indikator kinerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan lebih jauh kedalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan Tolok Ukur dan Indikator Kinerja tersebut terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan dengan tabel T-C.30 yang berisikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

**TABEL T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO.	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATT ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Meningkatnya Produk Peternakan yang Berkualitas	Meningkatnya status kesehatan hewan ternak	Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS)	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
2.	Meningkatnya pendapatan peternak	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	1. Persentase peningkatan populasi ternak yang berkualitas	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
			2. Persentase peningkatan produksi ternak yang berkualitas	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
		Meningkatnya pemasaran produk peternakan	1. Persentase Peningkatan Jumlah produk peternakan yang dipasarkan	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
			2. Persentase Jenis produk peternakan yang dipasarkan	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	
			3. Persentase Kegiatan Promosi produk peternakan	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	4 %	6 %	8 %	10 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

A. Tingkat Kinerja pelayanan OPD dan hal-hal Kritis terkait pelayanan OPD

Memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2018 sebagaimana yang tertuang pada LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah),

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

B. Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD terhadap pencapaian target kegiatan dan program.

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

D. Isu –isu penting dan prioritas yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2020

Adapun isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.
2. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
3. Peningkatan produksi hasil peternakan, hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak, Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
4. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :

**Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

lembar ...
dari....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pilihan					Urusan Pilihan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		0	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Disnak & Keswan	Tersedianyan jasa surat menyurat berupa : Materai 6000 dan 3000 Amplop Lembar Disposisi Jasa Pengiriman	12 bulan	15.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Disnak & Keswan	Tersedianyan jasa surat menyurat berupa : Materai 6000 dan 3000 Amplop Lembar Disposisi Jasa Pengiriman	12 bulan	15.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnak & Keswan dan UPT	Terbiayainya rekening telepon, koran, listrik,air dan internet dinas dan UPT	12 bulan	106.905	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnak & Keswan dan UPT	Terbiayainya rekening telepon, koran, listrik,air dan internet dinas dan UPT	12 bulan	105.000	

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnak & Keswan	Tersedianya honorarium aparatur dinas	12 bulan	211.400	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnak & Keswan	Tersedianya honorarium aparatur dinas	12 bulan	211.400	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedia alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	12 bulan	25.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedia alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	12 bulan	25.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	12 bulan	65.345	Penyediaan alat tulis kantor	Disnak & Keswan dan UPT	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	12 bulan	65.345	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnak & Keswan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas	12 bulan	85.180	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnak & Keswan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas	12 bulan	85.180	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnak & Keswan	Terwujudnya kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kenyamanan tempat kerja	1 paket	85.460	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnak & Keswan	Terwujudnya kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kenyamanan tempat kerja	1 paket	85.460	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnak & Keswan	Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan	12 bulan	4.800	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnak & Keswan	Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan	12 bulan	4.800	
	Penyediaan makanan dan minuman	Disnak & Keswan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	75.000	Penyediaan makanan dan minuman	Disnak & Keswan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	75.000	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disnak & Keswan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas dan UPT serta melaksanakan konsultasi	12 bulan	250.105	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disnak & Keswan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas dan UPT serta melaksanakan konsultasi	12 bulan	250.105	
--	--	-----------------	--	----------	---------	--	-----------------	--	----------	---------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Disnak & Keswan	Lancarnya kegiatan dinas dan operasional dinas	1 unit	350.000	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Disnak & Keswan	Lancarnya kegiatan dinas dan operasional dinas	1 unit	350.000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disnak & Keswan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		200.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disnak & Keswan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		200.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disnak & Keswan	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	12 bulan	190.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disnak & Keswan	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	12 bulan	190.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur					Program peningkatan disiplin aparatur					
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disnak & Keswan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu	86 stel		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disnak & Keswan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu	86 stel		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					

	Pendidikan dan pelatihan formal	Disnak & Keswan	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	12 bulan	13.580	Pendidikan dan pelatihan formal	Disnak & Keswan	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	12 bulan	13.580	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnak & Keswan	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicetak dan digandakan	12 bulan	49.835	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnak & Keswan	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicetak dan digandakan	12 bulan	49.835	
	Urusan Pangan					Urusan Pangan					
	Program peningkatan kesejahteraan petani					Program peningkatan kesejahteraan petani					
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Peternak	Pembinaan kelompok sebanyak 30 kelompok	17.850	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Peternak	Pembinaan kelompok sebanyak 30 kelompok	17.850	
	Urusan Pertanian					Urusan Pertanian					

	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan					
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH)	Peningkatan sumber daya penyuluh pertanian/peternakan lapangan	97.458	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH)	Peningkatan sumber daya penyuluh pertanian/peternakan lapangan	97.458	
			Terlaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat					Terlaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat			
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh					Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh			
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					

					82.306				82.306		
Pendataan masalah peternakan						Pendataan masalah peternakan					
	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini	5 PHMS			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini	5 PHMS			
	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat Hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar	20 toko obat hewan			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat Hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar	20 toko obat hewan			
	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelaporan yang profesional	2 UPT			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelaporan yang profesional	2 UPT			
	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pembinaan Puskesmas	2 UPT			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pembinaan Puskesmas	2 UPT			
	Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan SDM petugas Pelayanan Keswan dan Kesmavet	30 petugas			Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan SDM petugas Pelayanan Keswan dan Kesmavet	30 petugas			
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak					66.557	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			66.557		

		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Vaksinasi Rabies	10.00 dosis			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Vaksinasi Rabies	10.00 dosis		
		Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	Terlaksananya Vaksinasi SE	1.000 dosis			Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	Terlaksananya Vaksinasi SE	1.000 dosis		
		Pangkalan dan Kapur IX	Terlaksananya vaksinasi jembrana	250 Dosis			Pangkalan dan Kapur IX	Terlaksananya vaksinasi jembrana	250 Dosis		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit hewan menular (PHM)	35 sampel			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit hewan menular (PHM)	35 sampel		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi	200 ekor			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi	200 ekor		
		6 (UPT I - UPT VI)	Terlaksananya penanggulangan kasus gigitan HPR	Observasi HPR 150 ekor			6 (UPT I - UPT VI)	Terlaksananya penanggulangan kasus gigitan HPR	Observasi HPR 150 ekor		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	4 kali			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	4 kali		
	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik					Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik					
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit menular Rabies dan AI	50 ekor HPR	4.950		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit menular Rabies dan AI	50 ekor HPR	4.950	

	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah				39.201	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah				39.201	
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	13 kecamatan			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	13 kecamatan		
		Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)	13 kecamatan / 6 TPH (Kec. Akabiluru, Suliki, Guguk)			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)	13 kecamatan / 6 TPH (Kec. Akabiluru, Suliki, Guguk)		
		Kab. Lima Puluh Kota	Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	5 farm (Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuh LN, Harau dan Luak)			Kab. Lima Puluh Kota	Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	5 farm (Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuh LN, Harau dan Luak)		

		Kab. Lima Puluh Kota	Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, susu, telur dan olahannya)	5 pasar tradisional (Psr Limbana ng, Dangun g2, Piladan g, Taram, P akan Sabtu Luak dan Pakan Rabaa Simalan ggang)			Kab. Lima Puluh Kota	Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, susu, telur dan olahannya)	5 pasar tradisional (Psr Limbana ng, Dangun g2, Piladan g, Taram, P akan Sabtu Luak dan Pakan Rabaa Simalan ggang)		
		Kab. Lima Puluh Kota	Pembinaan Farm (Peternakan Ayam Komersil) untuk NKV	5 farm (Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuh LN, Harau dan Luak)			Kab. Lima Puluh Kota	Pembinaan Farm (Peternakan Ayam Komersil) untuk NKV	5 farm (Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuh LN, Harau dan Luak)		

Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	23.750	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	23.750	
Program peningkatan produksi hasil peternakan					Program peningkatan produksi hasil peternakan					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak				100.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak				100.000	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan	- Frozen Semen (sapi, kerbau)			Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan	- Frozen Semen (sapi, kerbau)		
			- N2 Cair					- N2 Cair		
			- P. Sheet					- P. Sheet		
			- P. Glove					- P. Glove		
			- Tissue					- Tissue		
			- Alkohol					- Alkohol		
	Kabupaten Lima Puluh	Terlaksananya kegiatan IB dan TE	- IB 10.000 dosis			Kabupaten Lima Puluh	Terlaksananya kegiatan IB dan TE	- IB 10.000 dosis		

		Kota					Kota			
				-TE 50 ekor					-TE 50 ekor	
		Pos IB dan Peternak	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IB dan TE serta kegiatan lainnya pada Bid Produksi	12 bulan			Pos IB dan Peternak	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IB dan TE serta kegiatan lainnya pada Bid Produksi	12 bulan	
	Pembibitan dan Perawatan Ternak				67.485	Pembibitan dan Perawatan Ternak				67.485
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di Inseminasi Buatan	- 2500 ekor			Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di Inseminasi Buatan	- 2500 ekor	
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi PKB dan kegiatan lainnya pada Bid. Produksi	- 12 Bulan			Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi PKB dan kegiatan lainnya pada Bid. Produksi	- 12 Bulan	
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat				2.147.557	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat				2.147.557

		kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL	Terlaksananya pengadaan ternak sapi dan ternak itik serta pendistribusiannya untuk kelompok-kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota	20 ekor			kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL	Terlaksananya pengadaan ternak sapi dan ternak itik serta pendistribusiannya untuk kelompok-kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota	20 ekor		
		kelompok - kelompok tani	Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit ternak kepada masyarakat dan kegiatan lainnya pd bid produksi	12 bulan			kelompok - kelompok tani	Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit ternak kepada masyarakat dan kegiatan lainnya pd bid produksi	12 bulan		
					95.967	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak				95.967	
		kelompok - kelompok tani di Kec Luak, LSH, Situjuah, Guguak, H arau,	Terlaksananya kegiatan percontohan penerapan pemberian pakan kosentrat untuk sapi potong pada kelompok tani ternak	15 ekor			kelompok - kelompok tani di Kec Luak, LSH, Situjuah, Guguak, H arau,	Terlaksananya kegiatan percontohan penerapan pemberian pakan kosentrat untuk sapi potong pada kelompok tani ternak	15 ekor		

		Bukik Barisan)				Bukik Barisan)				
		kelompok - kelompok tani di Kec Luak, LSH, Situjuh, Guguak,H arau, Bukik Barisan)	Terlaksananya pengujian sampel pakan ternak	10 sampel		kelompok - kelompok tani di Kec Luak, LSH, Situjuh, Guguak,H arau, Bukik Barisan)	Terlaksananya pengujian sampel pakan ternak	10 sampel		
		kelompok - kelompok tani di Kec Luak, LSH, Situjuh, Guguak,H arau, Bukik Barisan)	Terlaksananya Bimtek tentang pakan ternak	30 orang		kelompok - kelompok tani di Kec Luak, LSH, Situjuh, Guguak,H arau, Bukik Barisan)	Terlaksananya Bimtek tentang pakan ternak	30 orang		
		Kabupate n Lima Puluh Kota	Tersedianya bahan penyuluhan (buku tentang pakan ternak	50 buku		Kabupate n Lima Puluh Kota	Tersedianya bahan penyuluhan (buku tentang pakan ternak	50 buku		
		kelompok tani	Terlaksananya pembinaan dan monitoring ttg pakan ternak serta kegiatan lainnya	12 bulan		kelompok tani	Terlaksananya pembinaan dan monitoring ttg pakan ternak serta kegiatan lainnya	12 bulan		
	Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan Pakan				122.825	Kegiatan Pembelian dan pendistribusian			122.825	

ternak					vaksin dan Pakan ternak					
	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin Rabies dan SE, Jembrana	SE 1000 dan Jembrana 1000 serta Rabies 10000			Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin Rabies dan SE, Jembrana	SE 1000 dan Jembrana 1000 serta Rabies 10000		
	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya prasana dan prasarana untuk Vaksinasi, Eliminasi dan Surveillance	1 paket			Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya prasana dan prasarana untuk Vaksinasi, Eliminasi dan Surveillance	1 paket		
				58.500	Pengembangan Agribisnis Peternakan				58.500	
	Kab. Lima Puluh Kota	Terigistrasinya kandang ternak besar dan unggas	100 kandang			Kab. Lima Puluh Kota	Terigistrasinya kandang ternak besar dan unggas	100 kandang		
	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya bimtek untuk pelaku pengolah hasil produk peternakan	40 pelaku usaha			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya bimtek untuk pelaku pengolah hasil produk peternakan	40 pelaku usaha		
	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap peternak, kelompok tani ternak yang mendapat bantuan	20 kelompok / peternak			Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap peternak, kelompok tani ternak yang mendapat bantuan	20 kelompok / peternak		
	Kab. Lima Puluh Kota	Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	2 rim leaflet			Kab. Lima Puluh Kota	Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	2 rim leaflet		

Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	60.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	60.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	2 unit	61.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	2 unit	61.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	2 unit	58.230	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Pasar Ternak	2 unit	58.230
	Pasar Ternak Limbanan g Kec. Suliki & Pasar Ternak Padang Siontah Kec. Situjuh LN	Terpelihara/terawat fasilitas/asset yang ada dilokasi pasar ternak	2 unit / 12 bulan			Pasar Ternak Limbanan g Kec. Suliki & Pasar Ternak Padang Siontah Kec. Situjuh LN	Terpelihara/terawat fasilitas/asset yang ada dilokasi pasar ternak	2 unit / 12 bulan	
Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah				163.359	Promosi atas hasil Produksi Peternakan				163.359

					Unggulan Daerah				
	Kabupaten lain, IKK Sarilamak	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	2 kali pameran			Kabupaten lain, IKK Sarilamak	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	2 kali pameran	
	Kab. Lima Puluh Kota	Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui Expo Peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat	Lomba Ternak Tingkat Provinsi			Kab. Lima Puluh Kota	Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui Expo Peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat	Lomba Ternak Tingkat Provinsi	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna				621.155	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna				621.155

	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan mesin chopper penghancur kompos dan pemotong rumput untuk kelompok yang telag di CP/CL di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedia alat mesin peternakan, 2 unit mesin chopper pengolahan kompos dan 2 unit mesin chopper pemotong rumput			Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan mesin chopper penghancur kompos dan pemotong rumput untuk kelompok yang telag di CP/CL di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedia alat mesin peternakan, 2 unit mesin chopper pengolahan kompos dan 2 unit mesin chopper pemotong rumput	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	19.620	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Kelompok se Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	19.620

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2019 serta mempertimbangkan kegiatan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan bagi masyarakat umumnya akan menjadi perhatian serius Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Adapun program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi maupun pemerintah nagari yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang nagari dan kecamatan. Kesemuanya itu ditampilkan pada Tabel C4 yang berisikan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019.

Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	6	7	10
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kelompok Tani	Nagari Gurun	50	Untuk kelompok KWT Maju Bersama, Sakato dan bersama (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan di bidang pertanian Nagari Labuah Gunuang	Nagari Labuah Gunuang	1000	Tidak ada nama kelompok dan alamat yang jelas
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Nagari Sungai Balantiak	50	Untuk kelompok Harapan Basamo dan Idaman (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Peningkatan Kemampuan lembaga Petani	Nagari Simalanggang	40	Untuk kelompok Koto Pudiang, Berkah dan Tunas Harapan (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan Kelompok Tani	KECAMATAN SULIKI	30	Untuk kelompok Bersaudara (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)

6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan Kelompok Tani	Nagari Gunung Malintang	50	Tidak ada nama kelompok dan alamat yang jelas
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pelatihan Penanaman Coklat	Nagari Suliki	150	Kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	bantuan ternak sapi kepada masyarakat	KECAMATAN MUNGKA	50	Tidak ada nama kelompok dan alamat yang jelas
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak Sapi	Nagari Simalanggang	10	untuk kelompok Berkah dan Koto Pudiang (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
10	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak Sapi	Nagari Sungai Balantiak	10	untuk kelompok Jambak saiyo dan air Bintungan (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
11	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Bibit Sapi	Nagari Gunung Malintang	35	Untuk kelompok Karya Basamo dan Sejahtera (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
12	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak Sapi untuk Masyarakat Miskin	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	27	Tidak ada nama kelompok penerima dan tidak sesuai dengan program Disnak Keswan
13	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Bibit Sapi	Nagari Gunung Malintang	40	untuk kelompok saiyo sakato (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)

14	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bibit Unggul Peternakan Sapi	Nagari Tujuh Koto Talago	20	Untuk kelompok Anduriang Sakato (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
15	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pengadaan sapi simental	Nagari Kurai	100	Untuk kelompok Semoga Berkah dan semoga jaya (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
16	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan ternak sapi	Nagari Jopang Manganti	6	untuk kelompok Manganti II dan kelompok Padang Sukses (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
17	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan ternak sapi	Nagari Mungka	30	untuk kelompok Bahagia dan kelompok KBM Abadi (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
18	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak	Nagari Simpang Sugiran	50	Tidak ada nama kelompok penerima
19	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak	Nagari Simpang Sugiran	50	Tidak ada nama kelompok penerima
20	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak	Nagari Simpang Sugiran	50	Tidak ada nama kelompok penerima

21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak Sapi	Nagari Situjuh Batua	20	untuk kelompok Sepakat Maju, KWT Mitra Bunda dan Kelompok Subur (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bantuan Ternak Sapi	Nagari Solok Bio-Bio	20	untuk kelompok Sepakat, Pincuran Tujuh dan Ingin Maju (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
23	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pengadaan Bantuan Ternak Kelompok Tani	Nagari Sarilamak	15	Tidak ada nama kelompok penerima
24	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pelatihan / Penyuluhan Sekolah Lapangan Kepada Kelompok Tani dan Kelompok Peternak	Nagari Koto Tangah	300	Untuk kelompok Ujuang Bukik, Berkah dan guna jaya (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
25	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	Nagari Labuah Gunuang	10	Tidak ada nama kelompok
26	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Pelatihan tentang Pembuatan Pakan ternak Kambing	Nagari Batuhampar	20	Untuk kelompok Al Ihsan, Bina Mandiri, Bukik Komba (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
27	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Pelatihan Pembuatan Pakan ternak	Nagari Tunga	2	Tidak ada nama kelompok

28	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak	penyegahan penularan penyakit rabies	KECAMATAN PAYAKUMBUH	40	Karena bantuan diberikan kepada masyarakat bila terjadi kasus gigitan hewan menular.
29	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak	Vaksinasi Rabies	Nagari Pauh Sangik	1	Karena bantuan diberikan kepada masyarakat bila terjadi kasus gigitan hewan menular.
30	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak	Pelatihan & Pengadaan Pakan Ternak	Nagari Koto Tengah	60	Untuk kelompok Batam Jaya, Sapayuang, Bina Sepakat (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
31	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan BETOR pembuangan sampah di setiap Nagari	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	6	Tidak ada nama kelompok penerima dan tidak sesuai dengan program Disnak Keswan
32	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Mesin Chopper Penghancur Kompos sebagai Alat Pendukung Kerja Pertanian	KECAMATAN BUKIK BARISAN	1	Untuk kelompok Rumbai Sejati, Limousin (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
33	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Mesin Chopper Penghancur Kompos sebagai Alat Pendukung Kerja Pertanian	KECAMATAN BUKIK BARISAN	1	Untuk kelompok Puti Mekar, Cinta Damai (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)

34	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Motor Roda Tiga untuk sarana Kebersihan	KECAMATAN BUKIK BARISAN	1	Tidak ada nama kelompok penerima dan tidak sesuai dengan program Disnak Keswan
35	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan teknologi Tepat Guna	Nagari Sungai Balantiak	50	Untuk kelompok Harapan Basamo, Panutan, Idaman (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
36	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan mesin pengolah sampah menjadi kompos	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	5	Tidak ada nama kelompok penerima
37	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan mesin pembuat pupuk organik masing-masing kelompok tani	Nagari Harau	12	Tidak ada nama kelompok penerima
38	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan, Pengolahan Sampah Nagari	Nagari Sungai Balantiak	2	Tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di Disnak Keswan

39	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengolahan Sampah Organik SASUPI	Nagari Tujuh Koto Talago	2	Tidak ada nama kelompok penerima
40	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Implementasi TTG bagi Pelaku Usaha dan Pelaku Utama	Nagari Tujuh Koto Talago	120	Tidak ada nama kelompok penerima
41	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Betor Untuk Bank Sampah SASUPI Tujuh Koto Talago	Nagari Tujuh Koto Talago	2	Tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di Disnak Keswan
42	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	pembinaan dan pelatihan teknologi tepat guna bagi pemuda	Nagari Ampalu	120	Untuk kelompok Suko Batani, Makmur, Sei. Kolam (Belum di Cp/CL dan disesuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
43	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bentor sampah	Nagari Situjuh Gadang	3	Tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di Disnak Keswan

44	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Betor Roda Tiga untuk Kelompok Subur Halaban	Nagari Halaban	1	Untuk kelompok Subur Halaban (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
45	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan untuk Kelompok Tani	Nagari Simpang Kapuak	11	Untuk kelompok Bintangan Sepakat (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
46	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Untuk Memenuhi Kebutuhan Akses Jalan Bagi Penduduk Miskin dan Terlantar	Nagari Galugua	1	Tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di Disnak Keswan
47	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Bantuan Motor Roda Tiga	Nagari Jopang Manganti	1	Untuk kelompok Padang Sepakat (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
48	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Becak Motor Sampah	Nagari Koto Bangun	1	Tidak sesuai dengan program dan kegiatan Disnak Keswan

49	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan Tehnologi Tepat Guna	Nagari Tungka	50	Untuk kelompok Koto Nan Baru, KWT Berkah Saiyo, Star Lestari, Piliang Tobing (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
50	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pembuatan Pabrik Pupuk Kompos	Nagari Sarilamak	2	Tidak sesuai dengan program dan kegiatan Disnak Keswan
51	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengadaan Alat Pecincang Kulit Coklat dan Rumput	Nagari Sarilamak	5	Untuk kelompok Berkah (Belum di Cp/CL dan disuaikan dengan kisi-kisi khusus Disnak Keswan)
52	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	bantuan becak motor untuk mengangkut sampah nagari sekecamatan harau	KECAMATAN HARAU	24	Tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di Disnak Keswan
53	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	bantuan mesin chopper untuk mengolah sampah	KECAMATAN HARAU	6	Tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di Disnak Keswan
54	Pembangunan Gerbang Masjid Hidayah		Pembangunan Gerbang Masjid Hidayah	13 Kecamatan	1 Unit	Tidak Layak karena tidak sesuai dengan kegiatan di Disnak Keswan

55	Pengadaan sapi simental produktif		Pengadaan sapi simental produktif	Kel. Tani Ternak Jorong Siamang Bunyi, jor. Taratak Nagari Kubang Kec. Guguak	8 ekor	Layak untuk kelompok Sepakat, Karisma Indonesia dan Usaha Baru (belum CP/CL)
	Bantuan mesin Chopper penghancur kompos		Bantuan mesin Chopper penghancur kompos	Kel. Tani Ternak Jorong Siamang Bunyi, jor. Taratak Nagari Kubang Kec. Guguak	4 unit	Layak untuk kelompok Mandiri (Belum CP/CL)
56	1. Bantuan mesin chopper kompos		1. Bantuan mesin chopper kompos	Mungka, Guguak, Akabiluru	5	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	2. Bantuan mesin chopper Pemotongan Rumput		2. Bantuan mesin chopper Pemotongan Rumput	Mungka, Guguak, Akabiluru	5	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	3. Bantuan Motor Roda Tiga		3. Bantuan Motor Roda Tiga	Mungka, Guguak, Akabiluru	5	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
57	1. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Tareh Nagari Balai Panjang		1. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Tareh Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial
	2. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Koto Malintang Nagari Balai Panjang		2. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Koto Malintang Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial

3. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Balai Panjang Nagari Balai Panjang		3. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Balai Panjang Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial
4. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Air Randah Nagari Balai Panjang		4. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr. Air Randah Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial
5. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Sawah Luar Nagari Balai Panjang		5. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Sawah Luar Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial
6. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Tampung Kodok Nagari Balai Panjang		6. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Tampung Kodok Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial
7. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Kubang Rasau Nagari Balai Panjang		7. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Kubang Rasau Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial

	8. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Bukik Nagari Balai Panjang		8. Kelompok tani ternak wanita (KTTW) Keluarga Miskin Jr.Bukik Nagari Balai Panjang	Nagari Balai Panjang		Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima dan untuk keluarga miskin sebaiknya di usulkan di Dinas Sosial
58	Peningkatan produksi hasil peternakan		Peningkatan produksi hasil peternakan	Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang	10 ekor	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
59	Bantuan ternak sapi simental f1		Bantuan ternak sapi simental f1	Jorong koto baru sariak laweh	5 ekor	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	Bantuan mesin chopper		Bantuan mesin chopper	Kelompok Bunga Matahari buruh andaleh sariak laweh akabiluru	1 buah	Layak (belum di CP/CL)
	Bantuan motor roda tiga/ betor		Bantuan motor roda tiga/ betor	Kelompok tanah mokah saiyo nagari gadang sariak laweh akabiluru	4 buah	Layak (Belum CP/CL)
				Kelompok BOS Sawah padang, Sariak Laweh, Akabiluru.		Layak (Belum CP/CL)
				Kelompok Berkah sawah padang sariak laweh akabiluru		Layak (Belum CP/CL)

				Kelompok bungo lado nagari gadang sariak laweh akabiluru		Layak (Belum CP/CL)
	Bantuan mesin chopper		Bantuan mesin chopper	Kelompok ternak sakato jorong koto baru sariak laweh	1 buah	Layak (Belum CP/CL)
60	Bantuan ternak sapi		Bantuan ternak sapi	Nagari Lubuak Alai Kec. Kapur IX	11 ekor	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	Bantuan ternak sapi		Bantuan ternak sapi	Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX	11 ekor	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	Bantuan ternak sapi		Bantuan ternak sapi	Kec. Lareh Sago Halaban dan Luak	5 kelompok	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan rabat beton kubang kondiak padang mengatas - kapalo bukik		Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan rabat beton kubang kondiak padang mengatas -kapalo bukik	Kec. Lareh Sago Halaban dan Luak		Tidak Layak Karena tidak sesuai dengan kegiatan di Disnak Keswan
61	Bantuan pengadaan sapi kelompok tani Bintungan Sepakat		Bantuan pengadaan sapi kelompok tani Bintungan Sepakat	Nagari Simpang Kapuak		Layak (Belum CP/CL)
	Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani talago dadok		Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani talago dadok	Jorong Tabiang nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	2 ekor	Layak (Belum CP/CL)
	Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani talagundi		Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani talagundi	Jorong Tabiang nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	2 ekor	Layak (Belum CP/CL)

	Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani arga		Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani arga	Jorong Rageh nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	2 ekor	Layak (Belum CP/CL)
	Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani saiyo		Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani saiyo	Jorong Subaladuang nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	2 ekor	Tidak Layak karena tidak ada kelompok ybs di lokasi tersebut
	Pembuatan gudang sterilisasi susu sapi perah kelompok tani sago pratama		Pembuatan gudang sterilisasi susu sapi perah kelompok tani sago pratama	Jorong Subaladuang nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak	1 Unit	Layak (Belum CP/CL)
62	Bantuan Ternak Sapi		Bantuan Ternak Sapi	Kec. Lareh Sago Halaban dan Luak	20 ekor	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	Bantuan Mesin Chopper Penghancur Rumput		Bantuan Mesin Chopper Penghancur Rumput	Kelompok cimpago jorong rageh Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban	1 buah	Tidak Layak Karena sudah menerima bantuan tahun 2019
	Bantuan Motor Roda (Betor)		Bantuan Motor Roda (Betor)	Kelompok Putra Putri Amanah Jrg Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban	3 buah	Layak
				Kelompok Saiyo Sakato Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban		Layak (Belum CP/CL)

				Kelompok Saiyo Sakato Jorong Padang Belimbing Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban		Layak
63	Sumur bor dan kelengkapan rumah potong hewan limbanang		Sumur bor dan kelengkapan rumah potong hewan limbanang	Nag. Limbanang Kec. Suliki		Tidak Layak Karena belum di cek ke lapangan
64	Pendistribusian bibit terbak kepada masyarakat		Pendistribusian bibit terbak kepada masyarakat	Kelompok suka maju Nagari Lubuak Alai	10 ekor	Layak (Belum CP/CL)
65	Bantuan ternak sapi simental f1 unur 18-36 bulan		Bantuan ternak sapi simental f1 unur 18-36 bulan	Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan	5 ekor	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima
	Bantuan Motor roda tiga (Betor)		Bantuan Motor roda tiga (Betor)	Nagari gunung malintang Kec. Pangkalan	2 unit	Tidak Layak Karena tidak ada nama kelompok penerima

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Nasional tahun 2020 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan RKP tahun 2020, memuat tema RKP tahun 2020 adalah :

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan fakta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia;

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2020 ini antara lain :

1. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (**tusi**) harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Holistik, Tematik, Terintegrasi dan Spasial.

- **Holistik – Tematik.** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, Kemen KLH, Kemen Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

- **Integratif.** Pencapaian kedaulatan pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organic, pengendalian harga dan impor pangan dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- **Spasial.** Pembangunan sawah baru misalnya harus mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar dan lain-lain.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan

- koperasi, dan iklim n investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
 8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
 9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
 10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappeda mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat program-program kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBD Kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan disajikan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati/Walikota.

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa datang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi organisasi dengan arah pembangunan yang akan dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran organisasi dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan organisasi dan setiap perangkatnya untuk berbuat demi kepentingan organisasi pemerintahan daerah menciptakan makna bagi masyarakat yang dilayani, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan yang ada sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi rencana strategis yang disusun harus lah sesuai dengan kaidah dan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah *“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis **“YANG MANTAP”** Berlandaskan Iman dan Taqwa”*.

Adapun penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi
2. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan
3. **Mantap** adalah akronim dari maju, amanah, bermartabat, dan berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
4. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang shaleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Adapun misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan dan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Memperkuat kelembagaan Nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan

Adapun data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

I. Populasi Ternak tahun 2013-2017

Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data populasi ternak berikut ini:

Tabel : Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 s/d 2017.

NO	JENIS TERNAK	Populasi Ternak/ekor					
		2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1.	2	3	4	5	6	7	
1	Sapi Potong	32.809	34.833	34.808	35.852	36.043	
2.	Sapi Perah	18	18	19	23	47	
3.	Kerbau	12.299	13.056	13.036	13.427	11.477	
4.	Kuda	93	100	80	84	75	
5.	Kambing	20.188	22.431	23.053	24.436	26.335	
6.	Ayam Buras	471.923	472.708	432.563	445.540	318.167	
7.	Ayam Ras Petelur	4.973.597	4.895.914	5.061.375	5.213.216	6.349.407	
8.	Ayam Ras Pedaging	3.734.454	4.288.039	5.445.233	5.608.590	14.947.100	
9.	Itik	171.780	190.157	186.934	192.318	121.568	
10.	Burung Puyuh	1.089.536	1.111.804	1.010.484	1.040.799	642.290	

I. Produksi telur 2013 - 2017

Produksi Telur Ternak Unggas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Ternak	Produksi Telur/kg				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ayam Buras	302.266,7	302.769,5	277.056,6	285.368	203.785,68
2.	Ayam Ras	38.346.432,9	37.739.786,9	39.023.201,3	40.193.897	48.830.567,97
3.	Itik	943.072,2	1.043.961,9	1.026.267,7	1.057.055	667.408,32
4.	Burung Puyuh	1.111.326,7	1.33.326,1	1.030.693,7	1.061.614	728.356,86

Ctt: 1 kg telur ayam buras= 25 butir, 1 kg telur ayam ras=16 butir

1 lkg itik = 15 butir

II. Produksi daging 2013-2017

Produksi Daging berdasarkan jenis ternak dari tahun 2013 s.d tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Ternak	Produksi Daging/Susu(sapi perah)per kg				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sapi Potong	805.873,07	939.928,00	950.576,00	979.093	1.120.944
2.	Sapi Perah	26.010,00	26.010,00	29.070,00	29.970	0
3.	Kerbau	207.975,90	216.321,88	185.845,00	191.420	161.548
4.	Kambing	34.702,69	40.029,66	40.500,24	41.715	73.319,40
5.	Ayam Buras	574.725,9	575.672,30	526.797,60	542.601	384.393,87
6.	Ayam Ras Petelur	3.640.673,0	3.583.077,00	3.704.926,50	3.816.074	4.627.269,92

7.	Ayam Ras Pedaging	4.069.333,7	4.659.484,20	5.933.523,40	6.111.529	16.003.879,68
8.	Itik	101.006,6	111.812,30	109.917,20	113.215	71.481,98
9.	Burung Puyuh	107.864,1	109.999,30	100.037,90	103.038	62.008,65

I. Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013 s.d 2017

Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2013 s.d tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	JENIS TERNAK	Jumlah Rumah Tangga Pemelihara Ternak per KK					
		2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1.	2	3	4	5	6	7	
1.	Sapi Potong	17.970	18.657	19.645	19.645	17.922	
2.	Sapi Perah	3	3	11	11	17	
3.	Kerbau	5.050	5.077	5.357	5.357	4.797	
4.	Kuda	41	46	43	43	44	
5.	Kambing	5.366	5.444	5.461	5.461	4.710	
6.	Ayam Buras	46.499	46.705	44.191	44.191	26.779	
7.	Ayam Ras Petelur	990	1.033	909	909	446	
8.	Ayam Ras Pedaging	723	749	764	764	513	
9.	Itik	6.686	7.208	6.526	6.526	3.980	
10.	Burung Puyuh	554	551	450	450	395	

Misi

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan rumusan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja /upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam pencapaian visi adalah menyamakan dan mengerahkan semua energi/sumber daya untuk meningkatkan produksi peternakan.

Setelah adanya kesamaan persepsi maka potensi keberhasilan pencapaian visi lebih besar, karena merupakan komitmen bersama dalam suatu organisasi.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Tujuan

Bertolak dari misi yang ditetapkan di atas, maka **tujuan** yang ingin dicapai dan diwujudkan pada akhir pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

1. Meningkatnya produk peternakan yang berkualitas
2. Meningkatnya pendapatan Peternak

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

a. Strategi

1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2. Peningkatan produksi hasil peternakan
3. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
4. Peningkatan penerapan teknologi peternakan
5. Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan

b. Kebijakan

1. Pendataan masalah peternakan
2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan ternak
7. Pembiitan dan perawatan ternak
8. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
9. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
10. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
11. Pengembangan agribisnis peternakan
12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
15. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
16. Monev
17. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
18. Monev
19. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan

3. Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan

Program pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program pembangunan peternakan disusun dengan mengacu kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun 2011 - 2015
4. Rencana Strategis Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015
5. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2015
6. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 – 2015

Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

” Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ”Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan taraf / kualitas hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri serta gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jompo. Bank Tanah Nagari, Usaha ekonomi Produktif pemuda.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, Mesjid, MDA, TPA/TPSA dan Pondok Pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka mengharumkan nama daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi seutuhnya dan Jaminan Penjejang Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat.

6. Peningkatan Pembangunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensial lokal.
7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribatan dan kerukunan antar umat beragama.
8. Mewujudkan keberadaan kota sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan infrastruktur dan perangkat lunak.
9. Menghadirkan pengakuan, penghargaan dan kompensasi terhadap kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah berbasis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak nagari mempunyai andil dan jasa di Republik ini. Mengembalikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, beragama maupun kedaulatan adat.

1.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun isu-isu penting yang ada di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh jajaran dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2. Keterbatasan penggunaan lahan dibidang peternakan
3. Kurangnya ketersediaan bahan baku pakan ternak, terutama jagung sehingga kabupaten Lima Puluh Kota masih membeli dari daerah tetangga.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
5. Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan

- peternakan.
6. Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak
 7. Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternak besar dan kecil serta anggaran.
 8. Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
 9. Melaksanakan Bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha peternakan dan produk olahan hasil peternakan
 10. Rendahnya pelayanan kesehatan hewan
 11. Regulasi perbibitan
 12. Keterbatasan lahan peternakandan alih fungsi lahan
 13. Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku
 14. Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDm maupun administrasi kelompok
 15. Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok tani ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang beranggapan Bansos dan dana hibah tersebut sebagai bantuan lepas.

Adapun program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang di RENSTRA adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Misi pada RPJM	Prog ke
<p><i>I. Program Pelayanan admnistrasi perkantoran</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi 	<p>Mewujudkan reformasi birokrasi seutuhnya dan jaminan penjejanan karir dan kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan pekerja social masyarakat. (misi 5)</p>	

keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan Alat Tulis 6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah		
II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 2. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 3. Pengadaan mobil jabatan	Sda	
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	Sda	
IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal	Sda	
V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sda	
VI. Program peningkatan kesejahteraan petani 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani	Meningktakan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis	1

	<p>pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (misi 1) dan Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui gerakan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, ketahanan energy, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM gerakan usaha dini mandiri serta gerakan pemberdayaan perempuan, gerakan sayang jompo. Bank tanah nagari, usaha ekonomi produktif pemuda. (misi2)</p>	
<p>VII. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah</p> <p>1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah</p>	<p>Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan</p>	<p>Prog 1</p>

	manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (misi 1)	
<p>VIII. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan masalah 2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3. Pemusnahan tenak yang terjangkit endemik 4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah. 	<p>Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (misi 1) dan Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu serta meningkatkan</p>	<p>Prog 3 dan 4</p>

	<p>pemberdayaan surau masjid, TPA/TPSA dan produk pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumberdaya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu berprestasi, atlet dan mereka yang mengharumkan nama daerah (misi 3) dan Peningkatan pelayanan public dan penciptan iklim investasi yang disukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) (misi 4)</p>	
<p>IX. Program peningkatan produksi hasil peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2. Pembibitan dan perawatan ternak 3. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 4. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 5. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 	<p>Misi 1 dan Misi 2</p>	<p>Prog 2 dan Prog 3</p>

<p>X. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 2. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/ internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer 3. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan. 4. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/ promosi atas hasil produksi peternakan 5. Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase /eksebis/ promosi atas hasil produksi peternakan 6. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 7. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 8. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat 9. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 10. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 11. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan 	<p>Misi 1 dan misi 2</p>	<p>Prog 2,3 dan 4</p>
--	--------------------------	-----------------------

12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan		
<i>XI. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</i>	Misi 1	Prog 3
1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian sub sektor peternakan pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Program yang tertuang dalam belanja pokok (non urusan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pokok :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan telepon
3. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perUU
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

Output/Keluaran :

1. Jumlah materai 3000, jumlah materai 6000, jumlah amplop dinas, jumlah blanko disposisi.
2. Pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet lingkungan lingkungan Disnak dan keswan.

3. Pembayaran administrasi keuangan
4. Pembelian alat dan bahan kebersihan untuk lingkungan Disnak dan Keswan.
5. Pembelian ATK untuk lingkungan Disnak & Keswan.
6. Pembelian barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan kelengkapan dan Disnak & Keswan.
7. Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
8. Jumlah makan dan minum untuk rapat dan tamu
9. Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Jumlah pembelian bahan bacaan dan aturan perundan – undangan di kantor.

11. Jumlah kendaraan dinas / operasional
12. Jumlah pemeliharaan secara rutin / berkala kendaraan dinas
13. Jumlah gedung yang direhab
14. Jumlah pakaian dinas untuk aparatur
15. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
16. Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan diseluruh kecamatan, terlaksananya realisasi capaian kinerja dinas dan teralaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Program utama pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak

Out put Kegiatan :

1. Jumlah Frozen Semen
2. Jumlah N2 cair
3. Jumlah Alkohol
4. Jumlah Plastik Sheet
5. Jumlah Plastik Glove
6. Jumlah Tissue
7. Jumlah pelaksanaan kegiatan IB
8. Jumlah ET

9. Jumlah monev kegiatan IB dan ET
10. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat tentang perbibitan
11. Jumlah pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di IB
12. Jumlah kegiatan IB dan ET
13. Jumlah pembinaan, monev tentang IB, ET dan PKB
14. Jumlah pengadaan ternak dan pendistribusiannya untuk kelompok- kelompok tani

Rencana Program Prioritas : Peningkatan Pemasaran Produk Peternakan

1. Jumlah produk peternakan
2. Jenis produk peternakan
3. Jumlah promosi hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui bazar / pameran tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.
4. Pelaksanaan Pekan Nasional Petani
5. Jumlah peserta bimtek untuk meningkatkan pengetahuan peternak pelaku usaha pengolah hasil.
6. Jumlah pemberian rekomendasi usaha peternakan dan penguatan modal dari pemerintah.

Rencana Program Prioritas : Peningkatan Status Kesehatan Hewan

Output / Keluaran

1. Jumlah pendistribusian vaksin rabies, SE, Jembarana
2. Jumlah pembelian dan pendistribusian sarana dan prasarana untuk kegiatan vaksinasi, eliminasi dan survailance
3. Jumlah layanan kesehatan hewan
4. Jenis layanan kesehatan hewan

Rencana Program Prioritas : Pengamanan Sumberdaya Hewani

Output / Keluaran

1. Jumlah pengujian sampel bahan pangan asal hewan
2. Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies
3. Terawasinya lalu lintas hewan, Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas
5. Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat halal dan NKV
6. Jumlah peredaran obat hewan

Pada bagian ini dikemukakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Selanjutnya dapat dilihat pada matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dan/pagu indikatif.

TABEL TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	9	10			
1	Urusan Pilihan										
1	21	01			924.205.900			1.621.000.000			
1	21	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran						
1	21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat berupa : - Materai 6000 dan 3000 - Amplop - Lembar Disposisi - Jasa Pengiriman	Disnak & Keswan	12 bulan	15.000.000	DAU	12 bulan	16.000.000
1	21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet dinas dan UPT	Disnak & Keswan dan UPT	12 bulan	106.905.000	DAU	12 bulan	230.000.000
1	21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium aparatur dinas	Disnak & Keswan	12 bulan	211.440.000	DAU	12 bulan	463.000.000
1	21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedia alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	Disnak & Keswan dan UPT	12 bulan	25.000.000	DAU	12 bulan	37.000.000
1	21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	Disnak & Keswan dan UPT	12 bulan	65.345.900	DAU	12 bulan	146.000.000
1	21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelengkapan adm dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	85.150.000	DAU	12 bulan	95.000.000
1	21	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kenyamanan tempat kerja dan pengadaan pingir print, lap top, printer dll	Disnak & Keswan	1 paket	85.460.000	DAU	1 paket	115.000.000
03	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan untuk Dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	4.800.000	DAU		10.000.000
1	21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Disnak & Keswan	12 bulan	75.000.000	DAU	12 bulan	81.000.000
1	21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan terikutinya live stock expo tk propinsi serta perjalanan dinas diluar daerah dengan lancar.	Disnak & Keswan	12 bulan	250.105.000	DAU	12 bulan	438.000.000
1	21	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				740.000.000			438.000.000
21	04	02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Lancarnya kegiatan operasional dinas dan UPT	Disnak & Keswan	1 unit	350.000.000	DAU		400.000.000
1	21	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	190.000.000	DAU		438.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	02 42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung / kantor dinas dan UPT	Disnak & Keswan	12 bulan	200.000.000			250.000.000
		Program peningkatan disiplin aparatur				-			50.000.000
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu	Disnak & Keswan			DAU		50.000.000
1	21 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				13.580.000			35.000.000
1	21 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	Disnak & Keswan	12 bulan	13.580.000	DAU	12 bulan	35.000.000
1	21 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				61.030.000			159.000.000
1	21 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicetak dan digandakan serta laporan monev	Disnak & Keswan	12 bulan	49.835.000	DAU	12 bulan	150.000.000
	03 02 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Disnak & Keswan	12 bulan	11.195.000			9.000.000
2	01	Urusan Pertanian							
03	02 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan				97.458.000			250.000.000
	03 02 20 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh dan beroperasinya sistem informasi penyuluh pertanian (SIMLUH) sebanyak 19 orang	Kabupaten Lima Puluh Kota		97.458.000	DAU	12 bulan	250.000.000
			Terlaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat						
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh						
			Terlaksananya penguatan kelembagaan dan administrasi kelompok						
			Terlaksananya peningkatan SDM anggota kelompok						
			Terlaksananya pembinaan dan monitoring						
2	01 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				216.765.950			450.000.000
		Pendataan masalah peternakan				82.306.700			158.000.000
2	01 21 01		Terlaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini	Kab. Lima Puluh Kota	5 PHMS		DAU	5 PHM	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
		- Terlaksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat Hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar	Kab. Lima Puluh Kota	20 toko obat hewan				50 toko obat hewan	
		- Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelaporan yang profesional	Kab. Lima Puluh Kota	2 UPT				6 UPT	
		- Terlaksananya Pembinaan Puskesmas	Kab. Lima Puluh Kota	2 UPT				6 UPT	
		- Peningkatan SDM petugas Pelayanan Keswan dan Kesmavet	Kab. Lima Puluh Kota	30 petugas				6 UPT	
								6 UPT	
		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			66.557.750	DAU			145.000.000
2	01	21	02						
		- Terlaksananya Vaksinasi Rabies	Kab. Lima Puluh Kota	10.00 dosis				10000 dosis	
		- Terlaksananya Vaksinasi SE	Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	1.000 dosis				2200 dosis	
		- Terlaksananya vaksinasi jembrana	Pangkalan dan Kapur IX	250 Dosis					
		- Terlaksananya pemeriksaan laboratorium untuk penyakit hewan menular (PHM)	Kab. Lima Puluh Kota	35 sampel					
		- Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi	Kab. Lima Puluh Kota	200 ekor				300 ekor	
		- Terlaksananya penanggulangan kasus gigitan HPR	6 (UPT I - UPT VI)	Observasi HPR 150 ekor				Observasi HPR 50 ekor	
		- Terlaksananya koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	Kab. Lima Puluh Kota	4 kali				4 kali	
2	01	21	03						
		Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik			4.950.000				10.000.000
		- Terlaksananya pemusnahan ternak / hewan terjangkit penyakit menular Rabies dan AI	Kab. Lima Puluh Kota	50 ekor HPR	4.950.000	DAU		5000 ekor HPR	
		Pengawasan perdagangan ternak antar daerah			39.201.500	DAU			87.000.000
2	01	21	21						
		- Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemotongan hewan betina produktif	Kab. Lima Puluh Kota	13 kecamatan				13 kecamatan	
		- Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri dan Idul Adha)	Kab. Lima Puluh Kota	13 kecamatan / 6 TPH (Kec. Akabiluru, Suliki, Guguk)				13 kecamatan / 6 TPH	
		- Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	Kab. Lima Puluh Kota	5 farm(Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuah LN, Harau dan Luak)				5 farm	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
		Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, susu, telur dan olahannya)	Kab. Lima Puluh Kota	5 pasar tradisional (Psr Limbanang, Dangung2, Piladang, Taram,Pakan Sabtu Luak dan Pakan Rabaa Simalanggang)				5 pasar tradisional		
		Pembinaan Farm (Peternakan Ayam Komersil) untuk NKV	Kab.Lima Puluh Kota	5 farm(Kec. Mungka, Payakumbuh, Situjuh LN, Harau dan Luak)				5 farm		
01	xx	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan dokumen laporan pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kab.Lima Puluh Kota	Kelompok di 13 Kecamatan	23.750.000		50.000.000
2	01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan				1.443.254.200		2.577.000.000
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak				100.000.000	DAU	250.000.000
2	01	22	01		Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	- Frozen Semen (sapi, kerbau) - N2 Cair - P. Sheet - P. Glove - Tissue - Alkohol			- 10.000 dosis - 10.000 liter - 240 pak - 120 pak - 150 gulung - 100 liter
					Terlaksananya kegiatan IB dan TE	Kabupaten Lima Puluh Kota	- IB 10.000 dosis - TE 50 ekor			- IB 10.000 dosis - TE 50 ekor
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IB dan TE serta kegiatan lainnya pada Bid Produksi	Pos IB dan Peternak	12 bulan			12 bulan
				Pembibitan dan Perawatan Ternak				67.485.000	DAU	125.000.000
2	01	22	02		Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan ternak yang sudah di Inseminasi Buatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	- 2500 ekor			- 6.000 ekor
					Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi PKB dan kegiatan lainnya pada Bid. Produksi	Kabupaten Lima Puluh Kota	- 12 Bulan			12 bulan
				Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat				1.077.557.200	DAU	1.827.000.000
2	01	22	03		Terlaksananya pengadaan ternak sapi dan pendistribusiannya untuk kelompok-kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota	kelompok tani di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL	20 ekor			- 40 ekor

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
		- Terlaksananya pembinaan, monitoring, evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit ternak kepada masyarakat dan kegiatan lainnya pd bid produksi	kelompok-kelompok tani	12 bulan				12 bulan	
		Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak			58.887.000				105.000.000
2	01	22	05						
		- Terlaksananya kegiatan percontohan penerapan pemberian pakan kosentrat untuk sapi potong pada kelompok tani ternak	kelompok-kelompok	5 ekor				- 15 kelompok	
		- Terlaksananya pengujian sampel pakan ternak	kelompok-kelompok tani	10 sampel				- 25 ekor	
		- Terlaksananya Bimtek tentang pakan ternak	kelompok-kelompok tani	30 orang				- 3 Paket	
		- Tersedianya bahan penyuluhan (buku tentang pakan ternak	Kabupaten Lima Puluh Kota	50 buku					
		- Terlaksananya pembinaan dan monitoring ttg pakan ternak serta kegiatan lainnya	kelompok tani	12 bulan				12 bulan	
	01	22	06						
		Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan Pakan ternak			20.825.000	DAU		SE 2000 dosis dan Rabies 10000 dosis	44.000.000
		- Tersedianya vaksin Rabies dan SE, Jembrana	Kab. Lima Puluh Kota	SE 1000 dan Jembrana 1000 serta Rabies 10000					
		- Tersedianya prasana dan prasarana untuk Vaksinasi, Eliminasi dan Surveillance	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket				1 paket	
2	01	22	08						
		Pengembangan Agribisnis Peternakan			58.500.000				156.000.000
		- Terigistrasinya kandang ternak besar dan unggas	Kab. Lima Puluh Kota	50 kandang		DAU		300 kandang	
		- Terlaksananya bimtek untuk pelaku pengolah hasil produk peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	40 pelaku usaha					
		- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap peternak, kelompok tani ternak yang mendapat bantuan	Kab. Lima Puluh Kota	20 kelompok / peternak					
		- Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	Kab. Lima Puluh Kota	2 rim leaflet					
01	xx	21	05						
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab.Lima Puluh Kota	Kelompok di 13 Kecamatan	60.000.000				70.000.000
2	01	23							
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			236.589.600				360.000.000
2	01	23	05						
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan			58.230.100	DAU			50.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	9	10					
		Terpelihara/terawat fasilitas/asset yang ada dilokasi pasar ternak	Pasar Ternak Limbanang Kec. Suliki & Pasar Ternak Padang Siontah Kec. Situjuh LN	2 unit / 12 bulan									
	Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah				163.359.500			250.000.000					
2	01	23	07	-	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	Kabupaten lain, IKK Sarilamak	2 kali pameran	DAU	2 kali pameran dan lomba ternak				
				-	Terpromosikan hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan melalui Expo Peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	Lomba Ternak Tingkat Provinsi						
01	xx	21	05		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab.Lima Puluh Kota	Kelompok di 13 Kecamatan		60.000.000				
2	01	24			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				150.000.000				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna				100.000.000				
2	01	24	02		Terlaksananya pengadaan Bentor untuk kelompok yang telag di CP/CL di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya Bentor 1 unit	DAU	Tersedianya alat mesin peternakan, 3 unit mesin chopper pengolah kompos dan 3 unit mesin chopper pemotong rumput				
01	xx	21	05		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab.Lima Puluh Kota	Kelompok di 13 Kecamatan		50.000.000				
JUMLAH									3.788.978.650	DAU		DAU	6.090.000.000

Payakumbuh, Maret 2019
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota

Ir. PRIYADI BUDIMAN
NIP. 19621126 1989031003

BAB V

PENUTUP

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Disnak dan Keswan (Renja Disnak dan Keswan) tahun 2020. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020 disusun, semoga mampu

meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : Juli 2019

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. PRIYADI BUDIMAN
NIP. 198919620826